

Penyelenggaraan Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: Identifikasi Kendala dan Upaya Pembinaan

Renata Gultom ^{1,*}; Lukman Arif ²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia ; gultomrena00@gmail.com;

lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

*Correspondence : gultomrena00@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembinaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Huberman (2014). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Secara menyeluruh pembinaan kearsipan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi pada saat implementasi kegiatan pembinaan tersebut yaitu para pengelola dalam penunjukkan tugas untuk mengikuti kegiatan kearsipan dalam bentuk bimbingan teknis. Serta masih banyak sarana dan prasarana yang belum terpenuhi akibat kurangnya anggaran yang disediakan demi kelancaran kegiatan pengelolaan arsip. Selain itu masih kurangnya kolaborasi pemerintah, OPD lainnya, lembaga pendidikan maupun swasta dan seluruh lapisan masyarakat serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci

Kearsipan, Pembinaan, Strategi

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of archives in the Library and Archives Service of East Java Province and identify the obstacles faced in coaching activities. This research uses qualitative methods and data collection techniques using observation, interviews and documentation. The analysis in this research uses the interactive analysis model proposed by Huberman (2014). The results of the research explain that overall the archival guidance carried out by the East Java Province Library and Archives Service has been carried out well, however there are still obstacles faced during the implementation of these coaching activities, namely the managers in appointing tasks to take part in archival activities in the form of technical guidance. And there are still many facilities and infrastructure that have not been met due to the lack of budget provided for the smooth running of archive management activities. Apart from that, there is still a lack of collaboration between the government, other OPDs, educational and private institutions and all levels of society as well as activities carried out by the East Java Province Library and Archives Service.

Keywords

Archives, Development, Strategy

Pendahuluan

Pembinaan kearsipan merupakan aspek penting dalam pengelolaan arsip yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang kearsipan. Dalam konteks Indonesia, pembinaan ini dilakukan oleh berbagai lembaga, terutama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang berperan sebagai lembaga pembina kearsipan nasional. ANRI berupaya mengembangkan profesionalitas arsiparis melalui pendidikan formal dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan (Hernawati et al., 2022; Nirwana, 2023). Pelatihan yang dilakukan baik secara formal maupun informal dapat meningkatkan profesionalisme arsiparis dalam manajemen kearsipan (Hernawati et al., 2022). Selain itu, pembinaan kearsipan juga mencakup pengembangan kebijakan dan pedoman yang jelas untuk pengelolaan arsip di berbagai institusi, termasuk perguruan tinggi. Rachmaningsih mengungkapkan bahwa meskipun ANRI telah mengeluarkan pedoman kearsipan, otonomi internal di perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) menyebabkan ketidakseragaman dalam tata kelola arsip (Rachmaningsih, 2023). Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan yang konsisten dan dukungan sumber daya yang memadai untuk menjaga khazanah arsip perguruan tinggi (Rachmaningsih, 2023).

Implementasi peraturan terkait kearsipan juga menjadi fokus dalam pembinaan ini. Handayani menjelaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi harus didorong untuk menerapkan model berkelanjutan, yang mencakup berbagai aspek seperti kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan arsip, dan sumber daya pendukung (Handayani, 2019). Dalam konteks ini, pelatihan dan bimbingan teknis menjadi kunci untuk meningkatkan kompetensi arsiparis dan memastikan bahwa pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Febriana, 2020). Lebih jauh, pemerintah juga berperan dalam pembinaan kearsipan melalui berbagai inisiatif, termasuk pendirian sekolah tinggi kearsipan dan pelaksanaan peraturan pemerintah yang mendukung pengembangan SDM kearsipan (Agustina, 2021; Rahayuningsih, 2020). Dengan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, ANRI, dan institusi pendidikan, diharapkan kualitas pengelolaan arsip di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

Kewajiban dan tugas Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yaitu mengelola arsip statis yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi (Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan), lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota (instansi vertikal), perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Penyelenggaraan kearsipan melalui berbagai kegiatan kearsipan, disamping itu ada upaya Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui upaya pendampingan, sosialisasi, penyediaan anggaran dan penyediaan sarana prasarana kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melakukan

pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, lembaga kearsipan kabupaten kota dan lembaga pendidikan, organisasi profesi, ormas, orsospol dan perseorangan yang meliputi penyediaan pedoman kearsipan, koordinasi penyelenggaraan kearsipan, supervisi, sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan. Pembinaan kearsipan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan kearsipan utamanya untuk perangkat daerah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tahun 2022 menunjukkan bahwa ada aspek yang belum terpenuhi dalam penyelenggaraan kearsipan. aspek sumber daya masih terdapat kepala lembaga kearsipan daerah yang belum mengikuti diklat teknis bagi pimpinan lembaga kearsipan daerah. Terdapat 22 (dua puluh dua) atau 64,71% kepala lembaga kearsipan daerah provinsi belum memenuhi persyaratan kompetensi sebagai pejabat struktural di bidang kearsipan. kepala lembaga kearsipan daerah tersebut berasal dari lembaga kearsipan daerah yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua. Sebanyak 64,71 % kepala lembaga kearsipan daerah belum memenuhi syarat kompetensi berarti masih harus ditingkatkan kompetensi kepala lembaga kearsipan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian dan Lembaga tingkat pusat, Perguruan Tinggi serta Badan Usaha Milik Negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh pusat akreditasi kearsipan, serta pemerintah provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah Provinsi. Pembinaan pada dasarnya dilakukan oleh arsiparis lembaga kearsipan di setiap lingkup masing-masing daerah. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menjelaskan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bertugas untuk memberikan pembinaan kearsipan kepada instansi pusat dan lembaga arsip di daerah, lembaga arsip daerah provinsi bertugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan kepada instansi provinsi dan lembaga arsip di daerah kabupaten atau kota, dan lembaga arsip di daerah kabupaten atau kota memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan kepada instansi ataupun SKPD yang berada di lingkup masing-masing daerahnya. Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai kekurangan tenaga kerja arsiparis, bantuan dana dari pusat yang terbatas, dan pengadaan program yang kurang sehingga memiliki keterbatasan dalam memenuhi standar yang dikeluarkan oleh ANRI dalam kegiatan kearsipan.

Kegiatan pembinaan kearsipan di provinsi Jawa Timur, tentunya tidak serta merta berjalan dengan baik. Adanya beberapa permasalahan kearsipan yang dihadapi dalam pembinaan kearsipan adalah hal yang menyangkut kebijakan pembinaan kearsipan di daerah. Sebenarnya permasalahan yang timbul bukan sekedar masalah bagi arsiparis atau petugas arsip, akan tetapi permasalahan instansi secara menyeluruh yang berada di daerah terkait. Penyelenggaraan kearsipan melalui berbagai kegiatan kearsipan, disamping itu ada upaya Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui upaya pendampingan, sosialisasi, penyediaan anggaran dan penyediaan sarana prasarana kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, lembaga kearsipan kabupaten kota dan lembaga pendidikan, organisasi profesi, ormas, orsospol dan perseorangan yang meliputi penyediaan pedoman kearsipan, koordinasi penyelenggaraan kearsipan, supervisi, sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan.

Pembinaan kearsipan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan kearsipan utamanya untuk perangkat daerah. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Musaddad et al., 2020) maka suatu organisasi dapat menganalisis dan mengetahui apa saja yang dapat ditingkatkan dan dioptimalkan dalam organisasi sehingga langkah yang dilakukan lebih dinamis.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait pembinaan kearsipan seperti (Risgindara, 2021; Widiargo & Rukiyah, 2019), strategi peningkatan pengelolaan arsip (Herawan, 2019; Wuryatmini, 2020; Istikomah & Masruri, 2021). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis pada lokus penelitian yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur. Sehingga perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai mengenai penyelenggaraan Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembinaan. Studi ini dapat berkontribusi pada pengembangan kajian strategi pembinaan dalam organisasi publik.

Penelitian ini berfokus pada Aspek Pembinaan berdasarkan Perka ANRI Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintah Daerah. Aspek yang dibahas mencakup: kelembagaan untuk optimalisasi lembaga dan program, sumber daya untuk kebutuhan arsiparis dan pemberdayaan sumber daya manusia lainnya, sarana prasarana untuk keselamatan arsip, sistem pengelolaan arsip yang memastikan keamanan dan keakuratan informasi, serta alokasi anggaran untuk memperkuat program kearsipan. Sasaran dari pembinaan ini termasuk Lembaga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, serta pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya yang terlibat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, dan suatu data yang mengandung makna. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan pembinaan Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan data *sampling* dengan mengambil informan sebanyak 5 orang yang meliputi kepala bidang pembinaan, sub koordinator pemberdayaan kearsipan, 2 orang arsiparis madya muda dan arsiparis pertama Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Miles dan Huberman (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik kejenuhan, yang ditandai dengan tidak ada lagi data atau informasi baru yang diperoleh. Proses analisis meliputi penyajian data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Aspek Kelembagaan

Menurut Perka ANRI Nomor 22 Tahun 2012 tentang desain pembinaan kearsipan pada pemerintahan daerah, Pembinaan kelembagaan dilakukan guna menuju peningkatan optimalisasi lembaga beserta tugas-fungsi dan program yang dibuat, melalui:

- a. Optimalisasi lembaga sesuai dengan kebutuhan baik dalam hal bentuk, perumpunan, maupun tingkat eselonering.
- b. Optimalisasi fungsi dilakukan dengan perumusan fungsi dan tugas standar agar dapat memenuhi cakupan fungsi dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kearsipan.
- c. Optimalisasi program-program kearsipan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan kearsipan.
- d. Optimalisasi kegiatan kearsipan yang dapat memenuhi kebutuhan dan dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat (Perka ANRI No. 22, 2012: 10).

Analisis kelembagaan pertama-tama melibatkan identifikasi semua organisasi dan proses yang dapat berdampak pada atau dipengaruhi oleh kebijakan. Pembinaan kelembagaan dilakukan guna menuju peningkatan optimalisasi lembaga beserta tugas-fungsi dan program yang dibuat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur dalam aspek kelembagaan yang termuat dalam pernyataan yang

disampaikan oleh Esthi Kartikaningsih selaku Arsiparis Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa:

“Kebutuhan perangkat daerah sudah sesuai kebutuhan dan selalu jabatan sesuai dengan tingkat eselon yang dimiliki. Kalau penanggungjawab secara kelembagaan kan berarti OPD organisasi perangkat daerah itu sendiri. Kalau eselonering sudah sesuai, kebutuhan perangkat daerah juga sebenarnya sudah terpenuhi artinya gini dari sekian program kegiatan yang harus dilakukan lembaga kearsipan kita semua ada dan sudah diampu masing-masing bidang dan ada pembagian tugasnya dan yang jadi masalahnya perangkat daerah yang merupakan bukan lembaga kearsipan jadi mereka itu bisa dibilang lambat merespon apa yang kita mau. Peraturan kearsipan banyak terus kegiatan yang terkait juga sudah banyak tapi praktiknya banyak perangkat daerah yang tidak merespon dengan baik”. (Hasil Wawancara pada 13 September 2023)

Kemudian sesuai dengan perumusan dan fungsi terdapat Lembaga-lembaga yang membantu proses penyelenggaraan kearsipan agar dapat berjalan dengan optimal, Siti Nurul Inayati selaku Sub Koordinator Pemberdayaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menyatakan sebagai berikut:

“Sudah sesuai dengan Pergub 100/2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur susunan organisasi Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan Perda No.4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan “. (Hasil Wawancara pada 12 September 2023)

Berdasarkan data temuan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur memperlihatkan Kebutuhan perangkat daerah sudah sesuai kebutuhan dan selalu jabatan sesuai dengan tingkat eselon yang dimiliki. Sejalan dengan pendapat (Arif, 2020) yang menyatakan bahwa kelembagaan harus memiliki koordinasi yang baik dari seluruh aspek yang terlibat dalam kegiatan atau program yang diselenggarakan. Kemudian sesuai dengan perumusan dan fungsi terdapat Lembaga-lembaga yang membantu proses penyelenggaraan kearsipan agar dapat berjalan dengan optimal dalam hal ini dengan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur susunan organisasi Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Kelembagaan berpusat pada tujuan, nilai atau kebutuhan sosial utama. Lebih jauh dikatakan bahwa kelembagaan mengacu kepada suatu prosedur, kepastian, dan panduan untuk melakukan sesuatu. Menurut (Wuryatmini, 2020) aspek kelembagaan merupakan pengujian dan verifikasi terhadap pembentukan lembaga kearsipan dan unit kearsipan, tingkat eselonering, fungsi dan tugas, serta pembinaan kearsipan. Strategi yang dibutuhkan dalam kelembagaan untuk terus memperbanyak layanan, program, serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu aspek yang memiliki peranan besar dalam menjalankan dan mengerahkan penyelenggaraan kearsipan. Adapun yang

dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan aspek sumber daya manusia mengenai pemenuhan kecukupan kebutuhan arsiparis secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal kebutuhan arsiparis yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sudah mencukupi. Selain itu mengenai Penyebaran dan pemberdayaan arsiparis di suatu kementerian, lembaga, daerah, lembaga pendidikan, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan agar arsiparis tidak hanya bekerja untuk lingkungan unit kerja/satuan kerja dimana ia ditempatkan, melainkan dapat diberdayakan lebih dinamis dengan memberinya tugas untuk menangani penataan arsip di unit/ satuan kerja lain sesuai dengan kebutuhan. Bahkan dalam sebuah struktur organisasi atau kepemimpinan perusahaan misalnya, satu bagian khusus sengaja dibentuk untuk bertanggung jawab mengatur dan mengeksplorasi sumber daya manusia para anggota atau karyawan.

Siti Nurul Inayati selaku sub koordinator pemberdayaan kearsipan, dalam hal kebutuhan arsiparis yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur diperkuat oleh pernyataan Sunu Sudiharso selaku Arsiparis Madya Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mengenai Penyebaran dan pemberdayaan arsiparis yaitu sebagai berikut :

“Kalau mengenai kebutuhan sdm sendiri, arsiparis bisa dibilang cukup kita memang punya ahli arsip yang sudah berkompeten. tapi kalau semisalnya ditambahkan juga dengan arsiparis yang baru sih gapapa dalam artinya gini sebenarnya bukan yang berlebihan gitu kalau masalah sdmnya dan bahkan kalau ada rekrumen yang baru masih ada jobdesk yang masih kosong jadi sejauh ini bisa dibilang cukup, terkadang dari instansi yang kita bina membutuhkan bantuan, kita berdayakan para arsiparis ahli ini “ (Hasil Wawancara pada 13 September 2023)

Penyebaran dan pemberdayaan arsiparis di suatu kementerian, lembaga, daerah, lembaga pendidikan, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan agar arsiparis tidak hanya bekerja untuk lingkungan unit kerja/satuan kerja dimana ia ditempatkan, melainkan dapat diberdayakan lebih dinamis dengan memberinya tugas untuk menangani penataan arsip di unit/ satuan kerja lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk hal ini, pimpinan Unit Kearsipan/ Lembaga Kearsipan perlu menempuh langkah koordinasi secara persuasif dan lebih intensif. Siti Nurul Inayati selaku Sub Koordinator Pemberdayaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mengenai lembaga yang dibina belum memiliki kecukupan arsiparis yang menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau ditanya cukup enggaknya bisa dibilang tidak cukup karena lingkup pembinaan kita ya banyak ,perangkat daerah aja ada 50 perangkat daerah belum IPT belum BUMD belum kabupaten kota dan Masyarakat daerah ya bisa dibilang kurang ya . Kalau kebutuhan SDM kalau dilihat dari jumlahnya sih udah tapi kalau turun kelapangan ya kurang dan kalau dilihat secara regenerasi itu kita harusnya sudah membuat perencanaan ahli generasi karena arsiparis kita itu sudah banyak yang sudah mau pensiun. Tapi untungnya SDM kita sekarang memang berkompeten dibidang arsiparis “. (Hasil Wawancara pada 13 September 2023)

Adapun komposisi pegawai Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Timur seperti pada data tabel 1 bahwa dari aspek Sumber Daya Manusia yang

dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan setiap aspek yang ada dalam sumber daya manusia belum dipenuhi secara keseluruhan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat bahwa indikator yang memenuhi yakni optimalisasi pemenuhan kecukupan kebutuhan arsiparis, penyebaran dan pemberdayaan arsiparis, dan pola karir serta kesejahteraan pegawai yang memiliki *reward* dan *punishment*. Namun pada indikator pengangkatan pengelola arsip harus diarahkan ketika lembaga yang dibina belum memiliki kecukupan arsip. Nilai dan standar perilaku sumber daya manusia merupakan hal yang penting sehingga memerlukan perhatian yang lebih untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai standar yang telah ditetapkan (Irfani dan Lukman, 2022).

Tabel 1 Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	S-2	40	21,62
2.	S-1	62	33,51
3.	D-IV	7	3,78
4.	D-III	18	9,72
5.	D-II	6	3,24
6.	D-I	1	0,54
7.	SLTA	50	27,02
8.	SD	1	0,54
Total		185	100%

Sumber : Dokumen Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 2023

Namun berdasarkan tabel 1 komposisi pegawai Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Timur dapat diketahui bahwa mayoritas pegawainya memiliki riwayat pendidikan sarjana (S1) hingga magister (S2). Riwayat pendidikan tersebut dapat menilai kualitas sumber daya manusia. Menurut (Sunarmintyastuti & Hugo Aries Suprpto, 2019:105) sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. Selain itu mengenai Penyebaran dan pemberdayaan arsiparis di suatu kementerian, lembaga, daerah, lembaga pendidikan, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan agar arsiparis tidak hanya bekerja untuk lingkungan unit kerja/satuan kerja dimana ia ditempatkan, melainkan dapat diberdayakan lebih dinamis dengan memberinya tugas untuk menangani penataan arsip di unit/ satuan kerja lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk hal ini, pimpinan Unit Kearsipan/ Lembaga Kearsipan perlu menempuh langkah koordinasi secara persuasif dan lebih intensif namun apabila jumlahnya banyak tentu jumlahnya tidak mencukupi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Wuryatmini, 2020) yang mengatakan bahwa aspek sumber daya manusia kearsipan yaitu pengujian dan verifikasi terhadap

pejabat struktural, arsiparis, dan pengelola arsip atas tanggung jawab, kedudukan hukum, kewenangan, serta kompetensi. Strategi yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yakni melakukan rekrutmen arsiparis ahli lainnya untuk membantu kekurangan - kekurangan SDM dalam memenuhi kebutuhan kearsipan.

3. Aspirasi (Aspirations)

Menurut Perka ANRI Nomor 22 Tahun 2012 tentang desain pembinaan kearsipan pada pemerintahan daerah, Pembinaan terhadap pemilihan dan penggunaan sarana dan prasarana diarahkan pada terpenuhinya standar kualitas sarana dan prasarana kearsipan yang dibutuhkan untuk tujuan keselamatan arsip, tanpa menimbulkan efek pemborosan. Aspek sarana prasarana adalah salah satu aspek yang memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan dimana ini merupakan aspek penunjang dalam suatu kegiatan dan dengan adanya aspek ini maka semua kegiatan yang ada dapat berjalan dengan baik. Sebagai bentuk upaya memaksimalkan strategi yang ada dalam penyelenggaraan kearsipan maka dibutuhkan adanya ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan menunjang program atau kegiatan penyelenggaraan arsip. Tujuan adanya standar sarana dan prasarana arsip adalah demi terpenuhinya kearsipan yang baik dan benar. Dwi Widjojaningsih (Kepala Bidang Pembinaan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur) menyatakan bahwa:

"Sarpras disini menurut saya sudah memenuhi kebutuhan yang ada mbak. Meskipun jumlahnya kurang kan setidaknya sudah ada. Jadi kita memaksimalkan saja" (Hasil wawancara pada 14 September 2023)

Adapun berikut daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:

Tabel 2. Daftar Sarana Dan Prasarana Kearsipan Yang Dimiliki Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

No.	Sarana dan Prasarana	Daftar Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Gedung	Gedung Perpustakaan Daerah	2
2.	Kendaraan	Mobil Perpustakaan Keliling	5
		Mobil Dinas	6
		Sepeda Motor Dinas	8
3.	Unit Kearsipan	Gedung Depo Arsip	2
4.	Sarana Arsip Statis	Komputer	8
		Printer	1
		Scanner	1
		Mikro Fim	1
5.	Arsip Dinamis Inaktif	Rak Arsip	387
		Mobile File	8
		Almari Peta	9
		Brankas	1
		Almari Katalog	25
		Meja Reservasi	1

No.	Sarana dan Prasarana	Daftar Sarana Prasarana	Jumlah
		Alat Penghancur Kertas	2
		Almari Foto	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas memperlihatkan bahwa aspek sarana prasarana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa daftar sarana prasarana kearsipan yang sudah direalisasikan dan memenuhi standar kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan Arsip Dinamis Aktif dan Arsip Dinamis Inaktif serta baik dari segi gedung dan yang lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wuryatmini, 2020) aspek saran dan prasarana dapat dinilai dengan melakukan pengujian dan verifikasi terhadap sarana dan prasarana kearsipan yang digunakan dalam mengelola arsip. Strategi yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melakukan penambahan peralatan-peralatan kearsipan seperti pengukur suhu AC, dan peralatan pendukung lainnya. Menurut (Herawan, 2023) dalam melaksanakan fungsi pembinaan kearsipan terdapat beberapa aspek yang harus disediakan salah satunya yaitu penggunaan sarana dan prasarana kearsipan.

4. Aspek Sistem

Pemahaman tentang sistem kearsipan harus dimiliki seorang pemimpin organisasi atau pembina kearsipan. Sistem menurut (Jeperson Hutahaean, 2016:2) dalam buku yang berjudul Konsep Sistem Informasi, Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Adapun yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur pada aspek sistem mengenai cara menata dan mengelola arsip yang dapat menjamin sebagaimana yang dinyatakan oleh Siti Nurul Inayati selaku sub Koordinator Pemberdayaan Kearsipan sebagai berikut :

"pasti ya setiap instansi atau lembaga pasti memiliki sop cara menata dan mengelola arsip. Setiap dokumen selalu dijadikan satu dan tidak dapat dipisahkan. misalnya di dinas ini memiliki sebuah dokumen kumpulan beberapa SOP yang mengatur seperti SOP peminjaman arsip, akuisisi arsip, layanan arsip dan lainnya jadi SOP itu sudah terstruktur dan sudah jelas dibuat dan apa fungsinya bagi setiap instansi dan tentu tidak akan ketuhannya ." (Hasil Wawancara pada 12 September 2023)

Kegiatan pembinaan sistem ini mencakup pelatihan pengelolaan arsip seperti klasifikasi, hingga penyimpanan secara elektronik. Dalam pembinaan sistem juga melakukan pengarahan mengenai hal-hal dasar, seperti arsip yang harus dideskripsi dan penyimpanan suatu arsip yang harus berada dalam satu tempat.

Berdasarkan hasil wawancara memperlihatkan bahwa pada aspek sistem di Dinas kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jatim dalam pembinaan kearsipan terletak pada Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Berdasarkan

uraian hasil wawancara diatas juga menunjukkan bahwa sistem yang ada di Dinas kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jatim pasti menata dan mengelola arsip yang utuh dan tidak dipisah menjadi satu berkas kemudian juga dokumen yang ada memiliki kode tersendiri dan aplikasi srikandi yang terpadu agar berkas dapat diakses dengan aman, mudah, murah dengan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Perka ANRI No. 22 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pembinaan terhadap sistem pengelolaan arsip dalam kegiatan pembinaan dilakukan meliputi pembinaan cara penataan dan pengelolaan arsip yang baik, sehingga arsip yang tersimpan lebih mudah ditemukan. Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh (Herawan, 2019) mengemukakan bahwa organisasi kearsipan harus mampu menjalankan sistem kearsipan nasional yang berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya dan mampu mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai suatu keutuhan informasi. Pengembangan sistem pengelolaan arsip haruslah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya penyelenggaraan kearsipan menuju ke arah kesempurnaan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Herawan, 2023) yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan arsip dinamis. Pemahaman tentang sistem kearsipan harus dimiliki seorang pemimpin organisasi atau pembina kearsipan. Strategi yang seharusnya dilakukan yakni terus melakukan update data yang ada pada sistem aplikasi maupun catatan manual yang dimiliki oleh Dinas kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jatim.

5. Anggaran

Aspek anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan untuk suatu program dalam kegiatan organisasi. Anggaran adalah konsep penting yang menggunakan garis anggaran untuk menggambarkan penjualan dua item atau lebih (Basuki, 2019). Dengan adanya anggaran suatu perusahaan dapat meminimalisir kerancuan dan bisa memberikan arah terhadap apa yang menjadi target dan tujuan. Semua aktifitas manusia memerlukan modal karena tanpa modal manusia tidak akan dapat berbuat banyak begitu juga dalam program kearsipan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur pada aspek anggaran sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Esthi Kartikaningsih selaku Arsiparis Madya sebagai berikut :

“ Kalau masalah anggaran khusus untuk dinas ini tidak ada, Jadi semua kegiatan yang ada di dinas ini baik bidang kearsipan maupun perpustakaan anggarannya sudah ditentukan oleh APBD, jadi tidak ada anggaran khusus maupun dana lain yang di peroleh untuk menunjang kegiatan di dinas ini.” (Hasil wawancara pada 13 September 2023)

Dipertegas oleh ibu Dwi Widjajaningsih selaku Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai berikut :

“ Ketika anggaran sedang dirumuskan ,dinaskan sudah menganalisis rencana untuk masa depan

dan menyerahkan perkiraan sesuai kebutuhan. Setelah anggaran disetujui, anggaran tersebut akan menjadi target atau batasan pengeluaran yang diinginkan dan pada akhir periode anggaran, biasanya akan dilakukan perbandingan antara belanja aktual dengan belanja anggaran. Jadi kita itu sudah menetapkan anggaran sesuai dengan program yang akan kita jalannya jadi semisalnya kurang dari anggaran yang kita tetapkan itu akan menjadi evaluasi buat kedepannya dan anggaran yang ada itu yang seharusnya kita maksimalkan dan berbicara tentang anggaran yang ada juga diperoleh hanya dari pemerintah bukan dari masyarakat atau pihak lain." (Hasil Wawancara pada 14 September 2023)

Anggaran pembiayaan yang dialokasikan dalam program kearsipan yakni sebesar Rp. 348.607.500. Anggaran tersebut diadakan untuk menunjang program urusan pemerintahan demi mencapai tujuan yang dimaksud diawal dibentuknya suatu kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Jawa Timur dan mencapai target yang telah ditetapkan. Anggaran tersebut diadakan untuk menunjang program urusan pemerintahan demi mencapai tujuan yang dimaksud diawal dibentuknya suatu kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Jawa Timur dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini seperti studi Risgindara (2021) bahwa anggaran yang jelas terhadap pengelolaan arsip dapat mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan arsip yang lebih optimal. Strategi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur mengoptimalkan anggaran yang ada pada kegiatan-kegiatan pelayanan dan program yang dimiliki oleh instansi tersebut. Anggaran merupakan salah satu aspek pendukung yang perlu diperhatikan lebih lanjut karena menjadi penentu dalam keberhasilan pengelolaan arsip (Evany et al., 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur dalam pembinaan kearsipan, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, aspek kelembagaan Dinas tersebut telah memenuhi kebutuhan dengan adanya bimbingan teknis seperti Indeks Kearsipan dan aplikasi Srikandi, meskipun pegawai yang dibina masih memerlukan pembinaan intensif lebih lanjut. Kedua, aspek sumber daya manusia belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun terdapat upaya dalam optimalisasi kebutuhan arsiparis, penyebaran arsiparis, serta pola karir dan kesejahteraan pegawai. Ketiga, sarana prasarana kearsipan di Dinas tersebut telah memenuhi standar untuk Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif. Keempat, sistem pengelolaan arsip di Dinas tersebut terintegrasi dengan baik melalui pengkodean dokumen dan aplikasi Srikandi untuk memastikan akses yang aman, mudah, dan akurat terhadap berkas. Kelima, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 348.607.500 menunjang program kearsipan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasi dan pemenuhan sarana prasarana akibat keterbatasan anggaran. Keenam, meskipun pembinaan kearsipan secara menyeluruh telah dilakukan dengan baik, terdapat kendala dalam penunjukkan tugas bagi pengelola arsip serta kurangnya kolaborasi dengan pihak terkait dan masyarakat untuk meningkatkan layanan dan program.

Sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pembinaan kearsipan, disarankan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur meningkatkan pelatihan dan *monitoring* terhadap pegawai dalam mengimplementasikan pengetahuan dari bimbingan teknis yang telah diberikan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kolaborasi dengan instansi pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk memperluas jaringan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip. Pengadaan sarana dan prasarana juga perlu diprioritaskan dalam alokasi anggaran agar kebutuhan operasional dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, perluasan program layanan dan peningkatan aksesibilitas informasi arsip kepada masyarakat juga harus menjadi fokus utama untuk memastikan arsip dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak yang berkepentingan.

Referensi

- Agustina, G. (2021). Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kelangkaan Arsiparis Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan (Jiper)*, 3(2). <https://doi.org/10.31764/jiper.v3i2.4371>
- Evany, N., Audya, R. D., & Amalia, R. (2023, August). Analisis Tata Kelola Arsip Dinamis Kantor Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Dalam Mewujudkan Kebijakan Tertib Arsip. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 27, pp. 49-60).
- Febriana, N. (2020). Prosedur Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis Sebagai Wujud Nyata Pembinaan Kearsipan Di Kabupaten Kebumen. *Diplomatika Jurnal Kearsipan Terapan*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.22146/diplomatika.57710>
- Handayani, T. (2019). Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Khazanah Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 11(2), 44. <https://doi.org/10.22146/khazanah.41493>
- Herawan, L. (2019). Strategi Peningkatan Pengelolaan Arsip Melalui Pengawasan Kearsipan Intern. *Jurnal Kearsipan*, 14(2), 107-120. <https://doi.org/10.46836/jk.v14i2.144>
- Hernawati, L., Santoso, B., & Muhidin, S. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan. *Jurnal Manajerial*, 21(1), 71-82. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v21i1.46377>
- Herawan, L. (2023). Strategi Pengelolaan Arsip Pembinaan Kearsipan Menjadi Informasi. *JIPi (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 8(2), 412-431.
- Irfani, K., & Lukman Arif. (2022). Strategi Membangun Kepercayaan Publik Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 6(1), 69-86.
- Istikomah, N., & Masruri, A. (2021). Strategi Pengembangan Kompetensi Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul. *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 5(1), 45-57.

- Madya, W. A. (2021). Optimalisasi Pembinaan Teknis Kearsipan dalam Pengelolaan Arsip Dinamis di Kelurahan Pada Kecamatan Prambulih Barat. *Jurnal*, 1, 44.
- Musaddad, A. A., Niswah, M., Prasetyo, K., & Hardjati, S. (2020). Implementasi Manajemen Kearsipan Di Sektor Publik. *Jurnal Governansi*, 6(2), 133-143.
<https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2843>
- Nirwana, S. (2023). Menciptakan bibit unggul sumber daya manusia bidang kearsipan. *Jurnal Administrasi Dan Kesekretarisan*, 8(1), 10-18.
<https://doi.org/10.36914/jak.v8i1.893>
- Rachmaningsih, D. (2023). Tata Kelola Arsip Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. *Journal of Documentation and Information Science*, 7(1), 1-10.
<https://doi.org/10.33505/jodis.v7i1.213>
- Rahayuningsih, F. (2020). Grand Design Pembinaan Sdm Kearsipan Di Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi Dokumen Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Grand Design Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan). *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 9(1), 49.
<https://doi.org/10.24036/112101-0934>
- Risgandara, G. (2021). *Pembinaan kearsipan oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan di Desa Raksabaya kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis*, Universitas Galuh : Jawa Barat
- Widiargo, R., & Rukiyah, R. (2019). Pengelolaan Arsip Inaktif Melalui Program Pembinaan Kearsipan Desa Oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(1), 93-102.